

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pemaparan di atas penelitian ini ditulis untuk memahami bagaimana pemerintah Vietnam melakukan proses sekuritisasi terhadap kasus *bride trafficking* perempuan Vietnam ke Tiongkok dengan menggunakan kerangka teori sekuritisasi oleh Barry Buzan dari Copenhagen School. Melalui analisis terhadap aktor pelaksana sekuritisasi, tindak tutur kata, penerimaan audiens, serta output kebijakan, penelitian ini telah menunjukkan bahwa perdagangan pengantin bukan sekadar persoalan kriminal atau sosial, melainkan telah berhasil dibingkai sedemikian rupa dan diperlakukan sebagai ancaman keamanan manusia dan keamanan nasional Vietnam. Proses sekuritisasi ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui rangkaian tindakan yang membawa isu ini naik dari ranah sosial-ekonomi menuju ranah keamanan negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Vietnam mempunyai peran utama sebagai *securitizing actor* yang dominan dalam mengangkat isu perdagangan perempuan ke Tiongkok sebagai ancaman eksistensial. Pemerintah, melalui Kementerian Keamanan Publik atau Ministry of Public Security, Kementerian Luar Negeri, serta lembaga dan media-media terkait lainnya, secara konsisten menyampaikan *speech act* yang menggambarkan fenomena *bride trafficking* sebagai ancaman bukan

hanya terhadap keamanan perempuan, melainkan juga stabilitas keluarga, martabat bangsa, serta lintas-batas di wilayah perbatasan. Melalui laporan tahunan nasional, publikasi kebijakan, serta pernyataan dalam forum bilateral dan regional, pemerintah membangun narasi ancaman yang kredibel dan didukung oleh data empiris mengenai jumlah korban, modus perekrutan lintas-batas, dan kerentanan struktural perempuan di komunitas pedesaan. *Speech act* ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif dan simbolik, karena lebih jauh menghubungkan antara ancaman trafficking dengan nilai moral, identitas nasional, dan tanggung jawab negara.

Keberhasilan *speech act* dapat terlihat melalui adanya penerimaan audiens yang meluas pada berbagai tingkat.. Pada tingkat paling dasar, yakni masyarakat lokal di wilayah-wilayah perbatasan seperti Lào Cai, Hà Giang, dan Cao Bằng mulai menerima narasi yang dibentuk oleh pemerintah bahwa perdagangan pengantin merupakan ancaman yang serius. Peningkatan pelaporan kasus oleh keluarga korban, terbentuknya relawan dari masyarakat *anti-trafficking*, serta partisipasi warga dalam program edukasi merupakan bukti nyata dari bentuk penerimaan yang kuat terhadap narasi negara. Kampanye penyadaran publik yang dilakukan oleh pemerintah bersama IOM dan NGO seperti Blue Dragon berhasil mengubah persepsi masyarakat tentang korban trafficking, dari yang sebelumnya sering dipandang sebagai permasalahan dan aib bagi rumah tangga menjadi ancaman bagi keberlangsungan keseluruhan masyarakat dan negara.

Di tingkat media juga memiliki perannya, yakni narasi ancaman direproduksi secara masif oleh VNExpress, VietnamNet, VTV dan berbagai saluran berita lainnya. Media memainkan peran kunci dalam mengamplifikasi data resmi pemerintah, menyebarkan kisah korban, dan memperluas pemahaman publik tentang bahaya *bride trafficking*. Berita-berita mengenai operasi penyelamatan, penangkapan jaringan kriminal, dan kerja sama bilateral dengan Tiongkok memperlihatkan penerimaan media terhadap framing pemerintah bahwa isu ini merupakan ancaman keamanan yang menuntut tindakan luar biasa.

Selain itu penerimaan audiens pada tingkat internasional juga terlihat ketika Vietnam berhasil memperoleh pengakuan dukungan regional dari forum COMMIT. Negara-negara di kawasan, terutama Tiongkok sebagai negara tujuan mayoritas korban, menerima narasi Vietnam bahwa perdagangan perempuan merupakan ancaman keamanan kemanusiaan yang harus ditangani oleh kedua negara termasuk negara dalam kawasan mekong. Penandatanganan nota kesepahaman bilateral Vietnam–Tiongkok tahun 2015, yang memfasilitasi operasi penegakan hukum lintas-batas dan pemulangan korban, menjadi bukti penting bahwa sekuritisasi Vietnam mendapatkan legitimasi internasional. Dukungan eksternal ini menguatkan posisi Vietnam sebagai negara yang tidak hanya menangani isu di tingkat domestik, tetapi juga mengambil langkah diplomatik untuk melindungi perempuan Vietnam di luar negeri.

Adanya penerimaan audiens yang luas dan memberikan hasil pada kesuksesan pemerintah Vietnam dalam mengubah wacana menjadi kebijakan konkret atau *output sekuritisasi*. Output paling nyata salah satunya adalah diterbitkannya National Plan of Action on Combating Human Trafficking 2016–2020, sebuah kebijakan nasional yang mencakup empat pilar utama: pencegahan, penegakan hukum, perlindungan korban, dan kerja sama internasional. Kebijakan ini menjadi bukti bahwa isu *bride trafficking* telah dikonstruksi sebagai agenda keamanan nasional. Rencana aksi ini diterjemahkan dalam berbagai tindakan nyata seperti pembentukan pusat rehabilitasi korban, unit investigasi khusus pada aparat keamanan, kampanye pendidikan publik berskala nasional, dan perluasan kerja sama bilateral serta regional. Selain itu, normalisasi wacana keamanan di media dan masyarakat luas menunjukkan bahwa sekuritisasi tidak hanya terjadi dalam ranah pemerintah, tetapi telah membentuk konstruksi kolektif mengenai perempuan sebagai subjek yang harus dilindungi negara.

Serangkaian proses yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Vietnam sebagai aktor sekuritisasi utama dengan dorongan dari beberapa aktor sekuritisasi lainnya yang mendukung legitimasi aktor utama dari jalannya proses sekuritisasi ini menunjukkan bahwa penggunaan teori sekuritisasi milik Barry Buzan (1998) relevan pada penelitian ini. Dihasilkan bahwa masalah ini bukan hanya sekedar masalah yang kejahatan biasa dari sebab sosial-ekonomi melainkan bersifat kompleks yang dapat menjadi keamanan non-tradisional. Segala upaya dan proses yang dilewati

oleh Pemerintah Vietnam menunjukkan bahwa proses sekuritisasi perlu melewati langkah-langkah strategis dan menunjukkan kemampuan aktor sekuritisasi dalam mendapatkan legitimasi.

#### **4.2 Saran**

Kebijakan National Plan of Action on Human Trafficking 2016–2020 yang merupakan output dalam penelitian ini, tidak berhenti sampai tahun 2020 melainkan memiliki visi pemberantasan *trafficking* sampai tahun 2030. Oleh karena itu, saran bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk melanjutkan dengan topik yang sama, dapat melanjutkan penelitian dengan fokus di tahun berikutnya atau melakukan penelitian terhadap proses sekuritisasi pada kasus *bride trafficking* yang terjadi pada perempuan dari negara lain dengan tujuan negara Tiongkok.